

RESPON TIONGKOK TERHADAP KERJA SAMA MILITER TAIWAN DAN AMERIKA SERIKAT TAHUN 2016-2023

Muhammad Nizam Ihsan Fadil¹

Abstract: *The conflict between China and Taiwan has been going on for a long time. For decades, China has always rejected all efforts for Taiwanese independence. Pressure continues to come from China in the form of reunification efforts followed by its one China policy, making Taiwan need allies to protect its national security. Taiwan's needs are directly proportional to the interests of the US which wants to reduce the influence of communism in the Asia Pacific region. Therefore, over time, Taiwan and the US have established military cooperation to strengthen Taiwan's national defense to face all forms of threats and aggression from China. However, China responded to this because the actions taken by Taiwan and the US were considered to have violated China's sovereignty values.*

This research is qualitative research with descriptive research methods, then the data collection technique is carried out by means of literature review with secondary data sources, namely through books, journals and also the internet. The concepts used in this research are national security, deterrence, and security dilemma to assess China's response to military cooperation between Taiwan and the US from 2016 to 2023.

Keywords: *China, Taiwan, United States, Military Cooperation, One China Policy*

Pendahuluan

Tiongkok dan Taiwan memiliki dinamika hubungan yang dapat diklasifikasikan sebagai sebuah pola hubungan subordinasi. Jika kita menarik kebelakang mengenai sejarah kedua negara yaitu pada saat pasc Perang Dunia II, Partai Komunis Tiongkok beralih dari yang sebelumnya menggunakan sistem monarki menjadi republik yang kemudian mengambil alih negara Tiongkok, hingga pada akhirnya kaum Komunis ini mendeklarasikan Republik Rakyat Tiongkok pada tanggal 1 Oktober 1949. Di lain sisi, Partai Kuomintang yang saat itu dipimpin oleh Chiang Kai-shek yang beraliran nasionalis membentuk dan membuat negara sendiri yang ingin lepas dari bagian negara Tiongkok setelah mengalami kekalahan dalam perang sipil menghadapi partai Komunis yang dipimpin oleh Mao Zedong (Sudjadmiko, 2010). Hasil dari kekalahan tersebut membuat Partai Kuomintang melarikan diri menuju Pulau Formosa dan mendirikan negara yang diberi nama Republik Tiongkok atau yang saat ini dikenal sebagai Taiwan. Kemenangan dari Partai Komunis Tiongkok tersebut berdampak pada perkembangan komunisme di Asia menyebar luas di negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara (Wijaya, 2015).

Sejak melakukan *self claim* sebagai negara Merdeka pada tahun 1949, system pertahanan menjadi hal utama yang dikembangkan dalam pembangunan Taiwan. Hingga tahun 2022, Klaim kemerdekaan tersebut hingga tahun 2022 telah mendapat pengakuan dari 13 negara dan telah memenuhi berbagai klasifikasi untuk menjadi negara berdaulat yang ditetapkan oleh PBB.

Tabel 1 Daftar Negara Yang Mengakui Kedaulatan Taiwan Per Tahun 2022

¹ Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail : aprin.ats@gmail.com.

No	Negara	Sejak Tahun
1	Belize	1989
2	Guatemala	1933
3	Haiti	1956
4	Vatikan	1942
5	Honduras	1985
6	Kepulauan Marshall	1998
7	Nauru	1980
8	Saint Lucia	2007
9	Palau	1999
10	Paraguay	1957
11	Saint Vitss	1983
12	Saint Vincent	1981
13	Grenadine	1981

Sumber: *International Sindo News 2022*

Akan tetapi hal tersebut tidak membuat Taiwan bebas dari tekanan dari luar negaranya. Terdapat tekanan politik besar yang datang dari Tiongkok salah satunya melalui *One China Policy* (Kebijakan Satu Tiongkok). *One China Policy* merupakan suatu gagasan yang dicetus oleh Tiongkok yang berisi bahwa hanya ada satu pemerintahan yang sah sebagai pemerintah dari seluruh Tiongkok, yang artinya Taiwan, Hong Kong, dan Makau masih berada dalam satu bendera dengan Tiongkok.

Salah satu konflik yang berkembang pasca berakhirnya Perang Dunia II adalah adanya konflik antara paham komunis dengan demokrasi liberal. Dengan berdirinya negara komunis di Tiongkok jelas akan sangat berdampak pada perkembangan global, terutama di kawasan Asia Timur. Melihat fenomena tersebut, AS yang merupakan pemimpin barat, merasa memiliki kewajiban untuk mengantisipasi berkembangnya gerakan komunis. Maka AS menyusun strategi politik globalnya yang disebut *Containment Policy*, yang mana suatu politik bertujuan mencegah berkembangnya pengaruh suatu negara atau sistem politik dari pihak lawan agar pengaruh komunisme tidak menyebar ke belahan dunia yang lain. Oleh karena itu, pada konflik Taiwan-Tiongkok ini AS menilai Tiongkok sebagai ancaman utama bagi keamanan di kawasan Asia Pasifik.

Taiwan yang memiliki kepentingan untuk mendapatkan kebebasan dari Tiongkok membuat Taiwan merasa terancam dan memerlukan sekutu untuk dapat mengimbangi kekuatan dari Tiongkok dan melindungi keamanan nasionalnya, serta negara yang mampu mendorong kekuatan militer mereka yang berada jauh dibawah kekuatan militer Tiongkok. Hal tersebut bertepatan dengan AS yang memiliki kepentingan untuk menekan penyebaran paham komunis di Kawasan Asia Timur. Menurut pandangan AS, Taiwan memiliki kedudukan yang vital baik pada bidang politik, ekonomi dan militer. Pertama, Taiwan tergolong sebagai negara yang pro-barat sehingga akan sangat menguntungkan

AS. Dengan adanya pangkalan pasukan AS di Taiwan maka jalur sumber daya dan jalur perdagangan antara sekutu-sekutunya akan terjaga. Kemudian yang ketiga adalah system sosial ekonomi di Taiwan yang bebas sesuai dengan keinginan AS. Yang terakhir adalah AS sangat berkepentingan agar sekutu-sekutunya tidak jatuh kedalam pengaruh komunisme (Agung, 2012). Oleh karena itu kepentingan AS dengan intervensinya dalam konflik Tiongkok-Taiwan sangatlah mutlak.

Namun kedekatan yang terjalin antara Taiwan dan AS tentu membuat Tiongkok tidak nyaman dikarenakan AS yang merupakan pesaing alami Tiongkok sebagai representasi kekuatan besar Barat dan Timur. Ditambah lagi dengan adanya prinsip *One China Policy* yang semakin mempersulit AS untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan, dikarenakan implementasi dari *One China Policy* tersebut yang menyatakan bahwa semua negara yang ingin menjalin kerja sama dengan Taiwan harus melalui pemerintahan Tiongkok. Oleh karena itu pada tahun 1979 kongres AS mengesahkan Undang-Undang Hubungan Taiwan yang dinamakan *Taiwan Relations Act* atau yang dikenal dengan TRA. Tujuan dari dikeluarkannya TRA adalah untuk membantu menjaga keamanan, perdamaian, dan stabilitas di Pasifik Barat dan mempromosikan kebijakan luar negeri AS melalui pengesahan kelanjutan hubungan komersial, budaya, dan hubungan lainnya antara rakyat AS dan rakyat Taiwan. TRA menjadi landasan AS untuk tetap menjalin hubungan dengan Taiwan dikarenakan larangan hubungan diplomatik resmi yang diberikan oleh pemerintah Tiongkok, sehingga tidak terdapat MoU (*Memorandum of Understanding*) atas segala kerja sama yang berjalan diantara AS dan Taiwan.

Kedekatan antara Taiwan dan AS tentu saja berpengaruh terhadap hubungan antara Tiongkok dan Taiwan. Pihak Beijing melihat bahwa kerja sama militer antara AS dan Taiwan dapat membahayakan implementasi kebijakan *One China Policy* nya. Sehingga pada jurnal penelitian ini akan mencoba untuk fokus pada respon pemerintah Tiongkok terhadap kerja sama yang berjalan diantara Taiwan dan AS.

Kerangka Teori

Penelitian ini akan menggunakan tiga konsep, *national security*, *deterrence*, dan *security dilemma*. Evolusi paradigma keamanan dan perubahan dari "*national security*" menjadi "*international security*" hingga menjadi "*global security*", yang masih-masing didasarkan pada asumsi teoritis dan politik yang berbeda, terkait erat dengan evolusi historis sistem internasional dan kemajuan intelektual di bidang keamanan. Dalam setiap fase kita menemukan penafsiran, sebuah upaya untuk menjembatani kesenjangan dan mengembangkan konsep-konsep yang menyatu, membangun kemampuan manusia dan negara untuk berperilaku rasional.

Untuk menghadapi sebuah ancaman, keamanan nasional dipahami sebagai kebutuhan mendasar dengan tujuan melindungi dan mempertahankan kepentingan nasional suatu negara dengan menggunakan kekuatan politik, baik yang bersumber dari dalam maupun luar negeri. Sudut pandang ini mendukung argument bahwa keamanan nasional di negara-negara demokratis sering kali mencakup keamanan negara, keamanan kelompok dan keamanan manusia (*state security, public security, and human security*) (Mukhtar, 2005).

Deterrence merupakan sebuah konsep dimana sebuah aktor berupaya meningkatkan kemampuan atau kapasitas militernya untuk menangkal serangan atau ancaman dari pihak lawan, atau meningkatkan dan menekan lawan agar mempertimbangkan kembali jika ingin melakukan serangan (Jervis, 1979). *Deterrence* juga dapat ditafsirkan sebagai wujud penentangan untuk meyakini pihak lain dengan

dugaan pihak lain tersebut justru akan memberikan kerugian yang lebih besar. Instrument yang digunakan untuk menjalankan kebijakan deterrence bisa berupa penggunaan senjata konvensional, meningkatkan kapasitas militer secara general, membentuk aliansi sanksi ekonomi dan embargo, hingga ancaman melakukan pembalasan.

Security dilemma adalah sebuah keadaan dimana langkah yang diambil oleh suatu negara untuk meningkatkan kapasitas pertahanannya justru menimbulkan reaksi dari negara lain yang berakibat pada penurunan keamanan negara, bukan peningkatan. Jervis berpendapat bahwa terdapat tiga kesulitan yang dihadapi negara ketika mengalami sebuah dilemma keamanan. Yang pertama, terdapat probabilitas bagi negara untuk menyerang sekutunya ketika kerja sama tersebut dirasa tidak mencapai kepuasan maksimal. Manusia tergolong sebagai makhluk dinamis sehingga suatu Keputusan dapat berubah seiring berjalannya waktu. Kedua, terdapat motif kontrol sumber daya alam dan wilayah yang dilakukan oleh negara yang membuat negara-negara tidak mandiri harus memastikan kebutuhannya tetap tercukupi. Terakhir, upaya suatu aktor dalam mempertahankan keamanan nasionalnya terkadang justru menjadi ancaman bagi keamanan aktor lain sehingga muncul perasaan propaganda (Jervis, 1978).

Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Data dikumpulkan menggunakan teknik pengumpulan data telaah pustaka yang bersumber dari buku, jurnal penelitian, dan juga internet. Teknik analisis data yang digunakan adalah ada kualitatif. Penelitian ini menggunakan tiga buah konsep yaitu *national security*, *deterrence*, dan *security dilemma*.

Hasil dan Pembahasan

Multidimensi Ekonomi, Pertahanan, dan Politik Taiwan-AS

Makmurnya pertumbuhan ekonomi ditambah dengan persaingan jangka panjang dengan Tiongkok membuat Taiwan harus meningkatkan kapasitas pertahanan dan keamanannya untuk melindungi kedaulatan dan kelangsungan negaranya. Sehingga, AS sebagai negara adidaya dalam bidang militer dan ekonomi merupakan tempat bagi Taiwan untuk ikut serta. Kondisi Taiwan sebagai negara kepulauan yang tidak memiliki perbatasan darat, membuat perekonomian Taiwan bergantung pada jalur laut untuk dapat berdagang dengan dunia luar. Pada periode awal berdirinya Taiwan, AS telah memberikan dukungan yang signifikan pada bidang pertahanan dan keamanan. AS telah mengirim Armada ke-7 Angkatan Laut mereka ke Selat Taiwan ketika ancaman invasi datang dari Komunis Tiongkok pada awal tahun 1960-an untuk mempertahankan Taiwan dari serangan. Dengan adanya perlindungan yang didapatkan dari AS, Chinag Kai-shek yang saat itu memimpin Partai Kuomintang mengambil keuntungan dengan melakukan berbagai camformasi untuk memperkuat Taiwan (Cooper, 1996). Salah satunya adalah melakukan pemilu dan menciptakan sistem politik yang demokratis di Taiwan.

Hingga saat ini, Taiwan belum juga mendapat pengakuan sebagai negara yang merdeka oleh PBB. Hal tersebut merupakan adanya penghalang bagi Taiwan yaitu One China Policy yang digagas Tiongkok, sehingga semua negara atau pihak yang ingin melakukan kerja sama dalam bentuk apapun dengan Taiwan harus melalui pemerintah Tiongkok. Hal tersebut tentu menjadi kendala bagi Taiwan dan AS untuk menjalin kerja sama terutama pada bidang pertahanan. Oleh karena itu pada tahun 1979 Parlemen AS

merumuskan sebuah produk hukum agar tetap dapat menjalin hubungan kerja sama dengan Taiwan tanpa adanya perjanjian bilateral, yang dikenal dengan TRA (Taiwan Relations Act). Visi dari TRA adalah demi menjaga perdamaian, keamanan, stabilitas di Pasifik Barat dan untuk mempromosikan kebijakan luar negeri AS dengan mengesahkan kelanjutan hubungan komersial, budaya dan juga hubungan lainnya antara AS dan Taiwan. TRA dijadikan dasar atas semua kerja sama baik dibidang militer atau pertahanan, ekonomi, politik, dan bidang lainnya antara kedua negara.

Isi dari TRA adalah Presiden telah memutuskan bahwa hubungan antara pemerintah AS dan pemerintah Taiwan yang diakui oleh AS sebagai Republik Tiongkok sebelum 1 Januari 1979, Kongres AS berpendapat bahwa pengesahan undang-undang ini perlu dilakukan. TRA disahkan untuk membantu menjaga perdamaian, keamanan, dan stabilitas di Pasifik Barat untuk mempromosikan kebijakan luar negeri AS dengan mengesahkan kelanjutan hubungan komersial, budaya, dan lainnya antara masyarakat AS dan Masyarakat Taiwan (American Institute in Taiwan, 2022). Kemudian TRA adalah kebijakan AS untuk melestarikan dan memajukan hubungan komersial, budaya, dan hubungan lainnya yang bersifat luas, erat dan bersahabat dengan Taiwan. TRA menyatakan bahwa perdamaian dan stabilitas di Kawasan pasifik barat merupakan kepentingan politik, keamanan, dan ekonomi bagi AS, sekaligus menjadi perhatian internasional. Kemudian langkah yang diambil AS juga menjelaskan bahwa mereka akan menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok didasarkan pada sebuah cita-cita bahwa masa depan Taiwan akan ditentukan melalui cara-cara damai, untuk mempertimbangkan segala upaya untuk menentukan masa depan Taiwan selain melalui cara-cara damai, termasuk boikot atau embargo, adanya ancaman terhadap perdamaian dan keamanan wilayah Pasifik Barat, dan kecemasan besar bagi AS. TRA juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas militer Taiwan dengan memberikan senjata yang bersifat defensif sebagai pertahanan negaranya dan melawan segala bentuk upaya kekerasan atau bentuk pemaksaan lainnya yang dapat membahayakan keamanan, atau sistem sosial atau ekonomi, masyarakat Taiwan (American Institute in Taiwan, 2022).

Hasil dari hubungan yang dijalin oleh Taiwan dan AS kemudian berhasil meningkatkan kapasitas negara Taiwan yang tergolong sebagai negara yang maju, dari sisi pertahanan hingga ekonominya, yang membuat Taiwan menjadi negara yang memperoleh pujian dan prestasi dari dunia internasional. Salah satunya adalah kesuksesan Taiwan dalam mengatasi pandemi covid-19 yang mendapat pujian dari negara lain, dan menunjukkan Taiwan sebagai “mercusuar demokrasi” dalam banyak hal, sehingga menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Setelah membendung wabah di dalam negerinya, Taiwan berhasil mendapatkan reputasi sebagai negara yang Tangguh.

Pada bidang ekonomi, perekonomian Taiwan terstruktur pada sektor jasa, yang menyumbang sekitar 60% terhadap PDB. Kemakmuran ekonomi kapitalis dengan basis jasa ini berasal dari sektor swasta yang dinamis dan penuh kewirausahaan, yang mempekerjakan lebih dari 90% populasi pekerja. Lingkungan perekonomian dan kinerja Taiwan berjalan cukup baik. Taiwan mendapat skor yang sangat baik dalam beberapa faktor seperti kebebasan ekonomi dan juga kemudahan dalam menjalankan bisnis dan sangat kompetitif secara internasional, terutama karena pasar barang dan tenaga kerja yang efisien serta pasar keuangan yang sudah maju. Taiwan merupakan salah satu pemasok teknologi informasi utama bagi Perusahaan multinasional terkemuka di dunia yaitu MNC. Tetapi, tingginya tingkat keterbukaan Taiwan tersebut yang memiliki total ekspor dan impor barang dan jasa dengan capaian 140% PDB pada tahun 2012 juga merupakan kelemahan utama dari perekonomian Taiwan. Hal tersebut membuat

perekonomian Taiwan terlalu bergantung pada permintaan eksternal, terutama dari mitra dagang utama yaitu Tiongkok, Jepang, dan juga AS (Blaauw, 2013).

Taiwan menempati posisi ke-13 sebagai pemasok barang impor terbesar bagi AS pada tahun 2019, meningkat sebesar 18,6 persen jika dibandingkan dengan tahun 2018, dan meningkat sebesar 91,3 persen dibandingkan dengan tahun 2009. Nilai impor AS dari Taiwan menyumbang 2,2 persen dari jumlah impor AS secara keseluruhan pada tahun 2019. Tidak dapat dipungkiri AS memang mengalami deficit perdagangan sebesar 30 miliar USD, termasuk 17 miliar USD pada produk teknologi maju dengan Taiwan. Taiwan adalah pasar yang bagus untuk komponen elektronik, pesawat terbang, peralatan pertahanan, dan bahan mentah AS seperti minyak dan biji-bijian. Produsen peralatan canggih asal AS yang digunakan di parik fabrikasi semikonduktor telah menyumbang lebih dari setengah penjualan di subsector ini dan Perusahaan Taiwan adalah pelanggan utamanya. Taiwan hampir sepenuhnya bergantung pada impor guna memenuhi kebutuhan energinya dan akan terus mengalami peningkatan, termasuk bahan baku seperti logam mentah dan bahan baku untuk industri kimia. AS menjadi pemasok utama dalam bahan baku untuk industri kimia (Duesterberg, 2021).

Pada abad 21, kerja sama antara Taiwan dan AS dalam bidang pertahanan masih berlanjut. Dibawah rezim Barrack Obama AS memberi member persetujuan terhadap rencana penjualan senjata ke Taiwan sebesar 6,4 milyar dollar AS. Isi dari penjualan persenjataan tersebut terdiri dari 114 misil patriot senilai 2,81 milyar dollar AS, dan 60 helikopter Black Hawk senilai 3,1 milyar dollar AS dan 340 juta dollar berupa peralatan komunikasi yang diperuntukan bagi pesawat tempur F-16 yang dipesan Taiwan (BBC, 2010).

Dinamika Hubungan Taiwan, Tiongkok, dan AS

Awal mula ketegangan didalam hubungan diplomatik Taiwan dan Tiongkok terjadi pada Perang Saudara tahun 1927. Konflik tersebut disinyalir akibat perpecahan ideologi dan perebutan wilayah yang terjadi antara Partai Nasionalis Kuomintang (KMT) dan Partai Komunis Tiongkok (PKT). Perang antara kubu Nasionalis dan Komunis berujung pada tahun 1949 dan dimenangkan oleh PKT, yang pada akhirnya PKT mengambil alih dan mendeklarasikan Republik Rakyat Tiongkok pada 1 Oktober 1949. Sementara kelompok nasionalis mundur dan melarikan diri ke Pulau Formosa yang dikenal dengan Taiwan.

Meskipun telah memisahkan diri dari Tiongkok, kedaulatan dari Taiwan masih belum dapat diakui oleh dunia internasional. Hal tersebut tentu disebabkan oleh prinsip One China Policy yang digagas oleh Tiongkok. Negara lain pun harus tunduk dengan prinsip tersebut karena Tiongkok Daratan merupakan satu-satunya negara yang secara sah dianggap sebagai perwakilan dari seluruh Tiongkok. Menurut Beijing, Taiwan dan Tiongkok merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan. Meski demikian dapat dikatakan bahwa kedua negara ini tetap berhubungan baik meskipun terdapat perseteruan. Terdapat dua alasan mengapa kedua negara tetap berhubungan baik. Yang pertama adalah konflik saling klaim ini sudah sangat melelahkan bagi keduanya dan adanya perang yang melibatkan kekuatan militer tentu akan semakin banyak memakan korban. Di sisi lainnya Taiwan juga tidak mungkin melakukan reunifikasi dengan Tiongkok dikarenakan Taiwan memiliki standar hidup yang tinggi dan sangat menjunjung tinggi kebebasan dalam berpolitik.

Alasan kedua adalah demokrasi. Sejak terbentuk pada tahun 1949, Taiwan berdiri dengan status demokratis dengan pemilihan umum yang terbuka, jujur, dan adil serta

menolak segala bentuk dari pembatasan kebebasan. Rakyat Tiongkok memprotes keras segala bentuk hubungan dengan Tiongkok. Namun, suka atau tidak, Taiwan harus menyadari bahwa Tiongkok adalah mitra dagang terbesar mereka. Hal tersebut dibuktikan dengan pada tahun 2014, volume perdagangan kedua negara mencapai 198 Dollar AS (Armandhanu, 2015).

Namun disisi lain pemerintah Taiwan tentu tidak akan tunduk pada One China Policy dan terus memperjuangkan cita-cita negaranya untuk menjadi negara yang berdaulat. Taiwan sangat menginginkan pengakuan dari dunia internasional sebagai entitas politik tergabung kedalam PBB secara utuh. Selain itu, Taiwan juga ingin mendapatkan kebebasan dalam menjalankan hubungan ekonomi dengan negara lain. Namun hal tersebut tidak akan berjalan dengan mudah karena Tiongkok menegaskan lewat prinsip nya bahwa semua negara yang ingin menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan harus melalui pemerintah Tiongkok. Untuk dapat mewujudkan impian sebagai negara berdaulat, Taiwan tentu membutuhkan sekutu untuk meningkatkan kapasitas pertahanan dan militer negaranya dan juga sekutu lain untuk menjalin kerja sama ekonomi demi membangun perekonomian negaranya. Oleh karena itu hadirnya AS sebagai negara pro demokrasi yang memberikan bantuan kepada Taiwan.

AS hadir dan secara konsisten memberikan dukungan dan bantuan terhadap Taiwan, mulai dari bantuan dibidang pertahanan dengan membangun pangkalan militer, latihan militer bersama, hingga menjadi *partner* kerja sama Taiwan dalam penjualan senjata. Namun AS tidak dapat dengan leluasa menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan dikarenakan komitmen AS untuk menghormati One China Policy dan tidak menjalin hubungan resmi dengan Taiwan dalam bentuk apapun. Oleh karena itu AS mengeluarkan TRA sebagai landasan hubungannya dengan Taiwan hingga saat ini. Tentu saja AS tidak semata-mata hanya ingin membantu Taiwan. AS juga memiliki alasan dan kepentingannya untuk melakukan intervensi, yaitu karena Taiwan merupakan negara yang menganjurkan sistem demokrasi dan AS merasa memiliki kewajiban untuk melindungi, sekaligus mengantisipasi penyebaran paham komunis di Pasifik Barat. Alasan selanjutnya adalah dikarenakan Taiwan memiliki letak geografis yang strategis sebagai jalur perdagangan AS.

Kehadiran AS dalam mendukung upaya Taiwan secara signifikan ditambah berbagai upaya Taiwan dianggap sebagai bentuk ancaman oleh Tiongkok. Dengan kondisi tersebut, Tiongkok harus berusaha sekuat tenaga untuk melakukan upaya reunifikasi melalui kekuatan militer. Tiongkok telah beberapa kali menunjukkan kekuatan militernya dengan Angkatan Udara dan Angkatan Lautnya ke daerah perbatasan Taiwan sebagai bentuk pencegahan aksi kemerdekaan. Langkah agresif yang dilakukan Tiongkok dianggap cukup keras mendesak Taiwan untuk menyetujui penyatuan kembali kedua negara tersebut.

Di lain pihak, AS juga memelihara hubungannya dengan Tiongkok dikarenakan adanya kepentingan ekonomi dan politik. Tiongkok melalui Shanghai Communique pada 28 Februari 1972 yang berisi AS mengakui bahwa baik Taipei dan Beijing sepakat bahwa hanya ada satu Tiongkok. Tentu perjanjian itu melemahkan hubungan diplomatik yang dijalin oleh AS dan Taiwan. Meskipun hubungan diplomatik formal antara AS dan Taiwan telah berakhir, hubungan informal antara AS dan Taiwan masih terjalin di bidang militer dan ekonomi. AS juga tetap menjalin hubungan dengan Tiongkok sehingga pada 1 Januari 1979 pemerintahan kedua negara kembali membuka hubungan diplomatik. Secara kuantitatif pola hubungan antara AS dan Tiongkok memang mengalami fluktuasi, tetapi secara kualitatif hampir tidak terdapat perubahan diantara hubungan kedua negara

tersebut. Keduanya sama-sama mengejar kepentingan nasional, dan berpura-pura seolah memiliki hubungan yang baik.

Bagi Tiongkok, Taiwan memiliki nilai yang sangat penting dan strategis, oleh karena itu Tiongkok tidak akan membiarkan adanya intervensi dari luar mengenai upaya reunifikasi nya tersebut. Lepasnya Taiwan dari Tiongkok akan memberikan dampak yang mendalam dan cukup kompleks bagi Tiongkok. Dengan deklarasi kemerdekaan yang dilakukan Taiwan dianggap sama dengan sebuah deklarasi perang. Jika pemerintah Tiongkok gagal mempertahankan Taiwan, maka hal itu dapat berpotensi menimbulkan pemberontakan yang serupa di Tibet, Xinjiang dan beberapa wilayah luar Tiongkok lainnya (Ross, 2002).

Tekad Tiongkok untuk mengintegrasikan kembali Taiwan terhambat oleh kehadiran Amerika Serikat. AS *Mindset* Perang Dingin dengan terus memasok senjata ke Taiwan dalam jumlah besar. Hal ini dilakukan AS untuk menangkal perilaku agresif Tiongkok dalam upaya melakukan upaya penyatuan kembali dengan Taiwan.

Kerja Sama Militer AS-Taiwan

Hubungan bilateral dalam bidang militer yang dijalin oleh Taiwan dan AS telah berlangsung sejak Perang Dunia II, namun bentuk kerja sama kedua negara sempat mengalami beberapa perubahan. Pada periode Perang Dunia II yaitu pada tahun 1941-1942, AS telah memberikan bantuan militer terhadap Taian melalui *United States Volunteers Group*, atau kelompok yang kemudian dikenal dengan *Flying Tigers* (Syafiq, 2016). Pada saat itu AS memberikan bantuan militer dengan tujuan membantu Taiwan dalam menghadapi Jepang. AS yang memiliki kepentingan di kawasan Asia-Pasifik mengirimkan Armada ke-7 untuk menangkal pengaruh komunis ke Selatan Taiwan. Selain itu, AS juga pernah memberi bantuan militer kepada Taiwan setelah *Flying Tigers* yaitu *US Naval Group* Tiongkok (*Sino-American Cooperative Organization*) yang disingkat SACO (Syafiq, 2016). SACO sendiri merupakan badan operasi intelejen antara Taiwan dan AS yang bertujuan untuk melawan Jepang dan disetujui oleh Taiwan dan AS pada tahun 1942.

Tidak hanya itu, perjanjian pertahanan baru kembali dibuat oleh Taiwan dan AS yaitu Sino American Mutual Defense Treaty pada tahun 1954 (Miles, 1957). Perjanjian tersebut dibuat dengan tujuan untuk memberi perlindungan kepada Taiwan dari kemungkinan ancaman yang datang dari Tiongkok pasca Perang Saudara di daratan Tiongkok di masa lalu. Perjanjian tersebut ditandatangani di Washington DC. Kerja sama militer ini dipersolid dengan adanya kesepakatan yang berisi, setiap serangan yang dilancarkan ke wilayah Taiwan dianggap sebagai serangan kepada AS, hal tersebut dikarenakan Taiwan dianggap sebagai bagian yang sangat penting dari aliansi AS di wilayah Asia Pasifik.

Perubahan besar terjadi pada hubungan antara Taiwan dan AS pada tahun 1972, yang mana pada saat itu Richard Nixon sebagai Presiden AS memperbaiki hubungan diplomatiknya dengan Tiongkok yang ditandai dengan terbentuknya Komunike Shanghai pada Februari 1972 (Syafiq, 2016). Komunike Shanghai merupakan dokumen penting dalam hubungan AS dan Tiongkok yang mengalami ketegangan sejak Perang Korea dan Perang Saudara Tiongkok. Terdapat beberapa prinsip utama dalam Komunike Shanghai yang menjadi panduan bagi hubungan AS dan Tiongkok. Yaitu kedua negara akan saling menghormati kedaulatan dan keutuhan Wilayah. Kedua, baik AS maupun Tiongkok sepakat untuk hidup berdampingan secara damai. Ketiga, Non-Intervensi dalam urusan

dalam negeri, sehingga kedua negara sepakat untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing. Terakhir, adanya perluasan pertukaran perdagangan dan budaya.

Walaupun telah melakukan normalisasi hubungan dengan Tiongkok, AS tidak menghentikan dukungannya terhadap Taiwan. Satu bulan setelah ditandatanganinya Komunike Shanghai tersebut, AS melanjutkan dukungannya terhadap Taiwan dengan membuat Taiwan Relations Act (TRA) yang disahkan pada 19 April 1979 oleh Jimmy Carter. TRA merupakan siasat AS agar tetap dapat menjalin hubungan kerja sama dengan Taiwan tanpa adanya perjanjian resmi yang mengikat kedua negara karena One China Policy yang menghalangi semua negara untuk menjalin segala bentuk kerja sama resmi dengan Taiwan.

Hubungan diplomatik yang dijalin AS dan Taiwan berlandaskan oleh perjanjian tertulis pertahanan bersama yang telah disepakati oleh kedua negara yang bertujuan untuk melindungi masyarakat, yang dalam kasus ini adalah melindungi masyarakat Taiwan dari ancaman yang datang dari komunisme Tiongkok.

Pada tahun 1982, selama perundingan Joint Communiqué Ketiga AS-Tiongkok mengenai penjualan senjata ke Taiwan, pemerintah Taiwan memberikan enam poin kepada AS yang diusulkannya untuk digunakan AS sebagai pedoman dalam menjalin hubungan dengan Taiwan. Enam poin tersebut kemudian dikenal sebagai *Six Assurance*. Isi dari *Six Assurance* yang pertama adalah AS tidak akan menetapkan tanggal penghentian penjualan senjata ke Taiwan. Kedua, AS tidak akan mengubah ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Hubungan Taiwan. Ketiga, AS tidak akan melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Tiongkok sebelum mengambil keputusan yang berkaitan dengan penjualan senjata AS ke Taiwan. Keempat, AS tidak akan melakukan mediasi mengenai isu Taiwan dan Tiongkok. Kelima, AS tidak akan menunjukkan sikap menekan terhadap Taiwan untuk melakukan perundingan dengan Tiongkok dan tidak akan mengubah pendiriannya mengenai kedaulatan Taiwan bahwa hal tersebut harus diputuskan secara damai oleh Tiongkok. Terakhir, AS tidak akan secara resmi mengakui kedaulatan Tiongkok atas Taiwan.

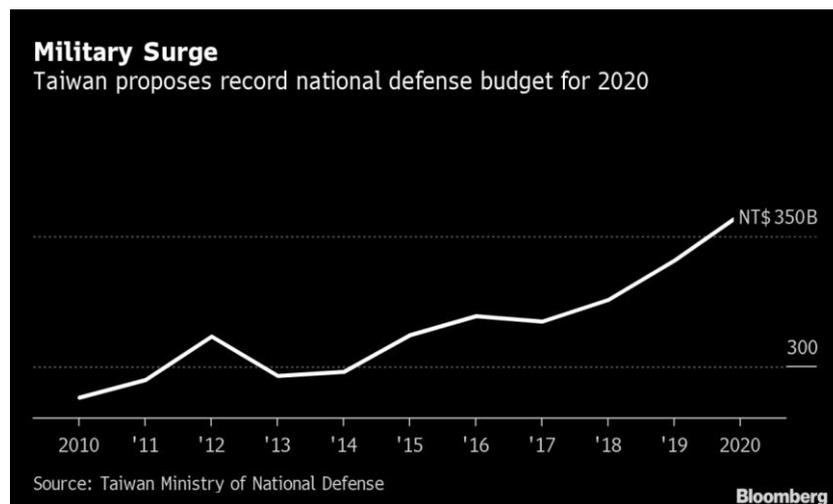
Pada era pemerintahan presiden Tsai Ing-wen, komitmen AS dalam kerja sama kedua negara dibuktikan dengan Taiwan berada pada urutan kedelapan di dunia sebagai negara dengan jumlah impor senjata terbanyak dari AS dan menempati peringkat pertama di Kawasan Asia Timur pada tahun 2017 lalu. Taiwan merupakan negara dengan potensi yang cukup menjanjikan dalam hal pertumbuhan ekonomi pasar dalam impor senjata dari AS. Pada periode 2010-2017, jumlah transfer senjata AS kepada Taiwan mencapai angka 3,438 milyar dolar AS sehingga kenaikan ini cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2010-2014 sebelum masa kepemimpinan Tsai Ing-wen.

Negara	Nilai Ekspor dalam Juta Dolar AS
Arab Saudi	3.425
Australia	1.172
Inggris	698
Israel	515
Irak	506
Uni Emirat Arab	499
Qatar	496

Taiwan	493
Jepang	479
Korea Selatan	456

Sumber: Statista. *The Statistic Portal. U.S. arms export 2017*

Tidak berhenti di tahun 2017, anggaran pertahanan negara yang digunakan Taiwan terus melonjak naik hingga tahun 2020 lalu, dibuktikan dengan total belanja militer yang menyentuh angka 350 milyar Dolar AS, jumlah tersebut merupakan jumlah tertinggi jika dibandingkan dengan tahun 2010 lalu sebelum era kepresidenan Tsai Ing-wen. Berikut adalah grafik peningkatan budget militer Taiwan dari 2010 sampai 2020.



Sumber: Bloomberg (2020)

Peningkatan angka tersebut terus berlanjut hingga tahun 2022. Peningkatan anggaran militer Taiwan juga berbanding lurus dengan peningkatan kapasitas militer Tiongkok. Berikut adalah tabel anggaran belanja militer kedua negara dari tahun 2016 hingga 2022.

Negara	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tiongkok	198538.36	210443.03	232530.60	240332.56	257973.43	285930.52	291958.43
Taiwan	9663.67	10479.98	10504.78	10993.17	11859.17	12893.98	12508.61

Sumber: SIPRI (*Stockholm International Peace Research institute*) 2023

Belanja militer tersebut meliputi persenjataan artileri, tank, *anti-ship missile*, hingga roket (SIPRI, 2023). Semua pembelian senjata tersebut dilakukan Taiwan sebagai bentuk upaya Taiwan dalam menangkal segala ancaman dan agresi yang datang dari luar. Namun, segala bentuk upaya peningkatan kapasitas militer yang dilakukan Taiwan untuk memperkuat sistem pertahanan negara yang bersifat defensif, justru dapat ditafsirkan sebagai tindakan ofensif oleh pihak Tiongkok. Upaya peningkatan kapasitas militer tersebut dinilai sebagai bentuk pemberontakan ditambah dengan aktor yang memfasilitasi *supply* persenjataan untuk Taiwan merupakan AS yang notabene negara pesaing Tiongkok dan memiliki komitmen dalam Komunike Shanghai untuk tidak melakukan intervensi terhadap urusan dalam negeri masing-masing negara. Pada akhirnya, upaya

peningkatan kapasitas militer yang dilakukan Taiwan justru menimbulkan *security dilemma*.

Respon Tiongkok Terhadap Dukungan AS Kepada Taiwan

Hubungan yang dijalin oleh Taiwan dan AS tentu merupakan bentuk strategi untuk menangkal implementasi dari kebijakan Tiongkok yaitu *One China Policy*. Kerja sama tersebut tentu dapat diartikan sebagai sebuah ancaman oleh Tiongkok, dikarenakan posisi Taiwan yang menurut Tiongkok masing bagian dari Tiongkok, sehingga Taiwan dan AS menggunakan TRA sebagai strategi untuk keamanan nasional nya, sebagai mana merujuk pada konsep *national security*. Kedekatan antara AS dan Taiwan tersebut tentu membuat Tiongkok murka dan merespon kerja sama kedua negara tersebut dengan segala cara, tanpa terkecuali dengan menggunakan kekuatan militer. Tiongkok memiliki pendapat bahwa penjualan senjata AS kepada Taiwan sangat menimbulkan kerugian bagi kedaulatan dan kepentingan keamanan Tiongkok (CNBC, 2023). Dengan begitu, penelitian ini akan memberikan informasi mengenai respon Tiongkok menggunakan kekuatan militernya terhadap kerja sama Taiwan dan AS pada periode 2016 hingga 2023.

Salah satu hal yang semakin memantik amarah dari Tiongkok adalah pidato presiden Tsai Ing-wen pada Hari Nasional Taiwan yang bertepatan pada 10 Oktober 2022 lalu (CNBC, 2023). Pada pidatonya tersebut, Presiden Tsai menegaskan bahwa tidak akan melakukan kompromi dalam bentuk apapun mengenai isu reunifikasi dengan Tiongkok seperti kemauan pihak Tiongkok. Taiwan pun telah meningkatkan pertahanan nasionalnya melalui kerja sama militer yang dijalin dengan AS dan telah meningkatkan senjata presisi dengan tujuan meningkatkan kekuatan dalam situasi perang asimetris. Perang asimetris merupakan istilah dalam taktik militer untuk menghadapi kapasitas militer musuh yang lebih kuat.

Menyikapi peningkatan kapasitas militer berkat kerja sama militer nya dengan AS tersebut Tiongkok mengambil jalur militer dikarenakan pernyataan Taiwan yang tidak lagi ingin melakukan perundingan dalam bentuk apapun. Langkah pertama yang dikeluarkan oleh pemerintah Tiongkok adalah dengan melakukan blokade laut atau *Maritime Blockade*. PLA (People Liberation Army) menggambarkan kampanye blokade dengan meluncurkan serangan rudal sebagai bentuk gertakan dan penyitaan pulau-pulau lepas pantai Taiwan. Dalam blokade di Taiwan ini, PLA memberikan ancaman terhadap kapal yang keluar masuk dari pelabuhan Taiwan dengan armada kapal selam AL (Angkatan laut) mereka yang termasuk sebagai armada kapal selam terbesar di Asia Timur. Upaya ini merupakan langkah yang paling mudah bagi Tiongkok karena letak geografis Taiwan yang menguntungkan karena perbatasan antara Taiwan dan Tiongkok hanya dibatasi oleh selat, dan Taiwan juga merupakan sebuah pulau kecil yang hanya dihubungkan oleh jalur udara dan laut (Fan, 2017). Kemudian Tiongkok juga melakukan *Limited Force or Coercive Options*. Upaya ini merupakan serangan terhadap infrastruktur dan kepemimpinan di Taiwan pada pemimpin mereka. Ketiga, upaya yang dilakukan Tiongkok guna merespon Taiwan adalah dengan Amphibious Invasion. PLA melakukan kampanye pendaratan pulau bersama, yang bertujuan untuk menerobos pertahanan Pantai di Taiwan dan membangun sebuah tempat pendaratan untuk PLA. Tiongkok juga terus meningkatkan kapabilitas dan membangun pendaratan amfibi yang lebih besar di Taiwan. Dengan adanya pembangunan area pendaratan amfibi tertentu dapat digunakan untuk mengangkut lebih banyak barang dan juga personel PLA.

Selain dari jalur laut, Tiongkok juga merespon dengan serangan dari jalur udara yaitu dengan *Air and Missile Campaign*. Tiongkok tidak ragu-ragu dengan penggunaan

unit rudal mereka, karena Tiongkok telah melanggar latihan militer dengan mengerahkan rudal-rudal balistik ke wilayah perbatasan Taiwan. Tiongkok telah menyiapkan rudal DF-16 yang dapat menyerang Taiwan dari jarak yang tergolong sangat jauh yaitu antara 1.000-1.500 Km.

Sama seperti Taiwan, Tiongkok juga berupaya untuk meningkatkan kapasitas militernya (Kompas, 2017). Terbukti dari kenaikan anggaran belanja militer Tiongkok dari tahun 2016 hingga 2022, yang mana anggaran belanja militer Tiongkok adalah sebesar 198538.36 Juta Dollar AS. Sedangkan pada akhir tahun 2022, anggaran militer Tiongkok mencapai 291958.43 Juta Dollar AS.

Pada september 2023, kedekatan AS dan Taiwan kembali membuat Tiongkok memanas. Penyebab dari hal tersebut adalah AS sepakat untuk melakukan supply peralatan militer kepada Taiwan di bawah program yang umumnya diberikan kepada negara-negara yang berdaulat dan merdeka. Tiongkok mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan AS tersebut sangat mencederai kedaulatan dan kepentingan Tiongkok serta mengacaukan perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan. Kementerian pertahanan Tiongkok telah mengecam tindakan AS dengan menyatakan bahwa Tiongkok akan merespon dengan segala macam cara termasuk menggunakan kekuatan militer Beijing untuk melawan hal tersebut dengan tegas.

Segala respon militer yang diberikan oleh Tiongkok merupakan bentuk *deterrence* terhadap situasi yang berjalan diantara Tiongkok dan Taiwan. Kenaikan anggaran militer Tiongkok tersebut juga menunjukkan tindakan *defensive* terhadap sikap *saparatis* Taiwan yang bertekad untuk memisahkan diri secara penuh dari pemerintahan Tiongkok. Karena segala bentuk kerja sama yang dijalin oleh Taiwan dan AS dinilai sangat mencederai kedaulatan Tiongkok, oleh karena itu upaya *deterrence* berupa peningkatan kapasitas militer yang dilakukan Tiongkok bertujuan agar AS tidak lagi melakukan intervensi konflik dalam negeri Tiongkok yang dalam kasus ini adalah konflik Taiwan.

Menurut analisa penulis, langkah yang diambil oleh Tiongkok justru menjadi sebuah dilema keamanan, karena tindakan mempertahankan kedaulatan negaranya tersebut justru dapat ditafsirkan sebagai tindakan yang agresif oleh pihak lawan yaitu Taiwan dan AS. Dilema yang dialami Tiongkok adalah apabila pemerintahan Tiongkok membiarkan pihak Taiwan untuk dapat dengan leluasa menjalin hubungan kerja sama dengan negara lain terutama AS, maka tujuan utama Tiongkok untuk melakukan reunifikasi dengan Taiwan tidak akan tercapai, yang mana penyatuan kembali Tiongkok dengan Taiwan merupakan hal yang mutlak jika mengimplementasikan *One China Policy*.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Tiongkok merespon dengan kekuatan militer sebagai bentuk *deterrence* dengan tujuan memberikan menangkalkan segala upaya *saparatis* Taiwan, disebabkan oleh sikap Taiwan yang tetap tegak pada pendiriannya untuk memisahkan diri dari Tiongkok seutuhnya sebagai negara yang berdaulat dan tidak membuka celah diskusi bagi Tiongkok untuk menyelesaikan konflik tanpa campur tangan militer. Jika melihat dari perspektif Tiongkok, maka langkah yang diambil oleh Tiongkok merupakan hal yang wajar bagi Tiongkok yang melakukan upaya defensif untuk mempertahankan keamanan nasional (*national security*) negaranya yaitu berupa reunifikasi dengan Taiwan yang terus menunjukkan sikap *saparatis* dan tidak mau berkompromi. Kerja sama militer yang dilakukan Taiwan dengan AS juga membuat situasi semakin memanas bagi Tiongkok yang sudah berulang kali memperingatkan AS untuk tidak menjalin hubungan diplomatik langsung dalam apapun dengan Taiwan, tetapi

harus melalui pemerintahan Tiongkok. Segala upaya peningkatan kapasitas militer Tiongkok juga bisa diinterpretasikan sebagai bentuk peringatan oleh Tiongkok, yang mana kekuatan militer Tiongkok memang sangat kuat, dan siap membalas segala potensi ancaman dari Taiwan dan AS dengan lebih dahsyat.

Daftar Pustaka

- Alfarisi, (2022). Kompleksitas Kepentingan Tiongkok dan Amerika Serikat di Taiwan. <https://hi.unida.gontor.ac.id/kompleksitas-kepentingan-as-Tiongkok-di-taiwan>
- American Institute in Taiwan, (2022). *Taiwan Relations Act (Public Law 96-8, 22 U.S.C. 3301 ET SEQ)*. <https://www.ait.org.tw/taiwan-relations-act-public-law-96-8-22-u-s-c-3301-et-seq/>
- BBC, (2010). *Tiongkok Hits Back at US Over Taiwan Weapons Sale*. <http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/8488765.stm>
- BBC, (2019). Tiongkok Ancam Amerika Serikat Karena Jual Pesawat Tempur Ke Taiwan. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-49424684>
- Brookings, (2023). *Understanding The One China Policy*. <https://www.brookings.edu/articles/understanding-the-one-china-policy/>
- CFR, (2023). *Why Tiongkok-Taiwan Relations Are So Tense*. <https://www.cfr.org/backgrounder/Tiongkok-taiwan-relations-tension-us-policy-biden>
- CNN, (2022), *What You Need To Know About Tiongkok-Taiwan Tensions*. <https://edition.cnn.com/2022/05/24/Tiongkok/Tiongkok-taiwan-conflict-explainer-intl-hnk/index.html>
- El-Saha, (2023), *Memahami Aturan Perang dalam Hukum Humaniter Internasional*. <https://kemenag.go.id/kolom/memahami-aturan-perang-dalam-hukum-humaniter-internasional-mbGpW>
- GFP, (2023). *2023 Taiwan Military Strength*. https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.php?country_id=taiwan
- Haftendorn, H. (1991). *The Security Puzzle: Theory-Building and Discipline-Building in International Security*.
- Hajiansyah, P. (2022). *Intervensi Amerika Serikat Apabila Republik Rakyat Tiongkok Menginvasi Taiwan*. Universitas Paramadina.
- Holsti, K.J. (1987). *Politik Internasional dalam kerangka Analisa*. Jakarta: Pedomam Ilmu Jaya.
- Ismail, S, et.al. (2021). *The United States (US) – Taiwan Strategic Partnership*. National Defense University of Malaysia.
- Kompas, (2022). *Mengukur Potensi Dampak Konflik Tiongkok-Taiwan*. <https://www.kompas.id/baca/riset/2022/08/12/mengukur-potensi-dampak-konflik-Tiongkok-taiwan>
- Mardhani, D, dkk. (2020). *Keamanan dan Pertahanan Dalam Studi Ketahanan Nasional Guna Mewujudkan Sistem Keamanan Nasional*. Universitas Indonesia.
- Meilianawati, S. (2011). *Pengaruh Implementasi Kebijakan Extended Deterrence Amerika Serikat Terhadap Kondisi Stabilitas Keamanan Semenanjung Korea*. eJournal Ilmu Hubungan Internasional Universitas Mulawarman.
- Olivia, Y. (2014). *Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan Internasional*. Universitas Riau

-
- Park, B. (2009). *Concluding Remarks: Coercion and Regional Powers, Defence Studies*, Vol.9, No.2
- Prasetya, D (2016). Strategi Defensif Tiongkok Dalam Merespon Kebijakan Amerika Serikat Atas Taiwan. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Puspitari, A. (2016). Kajian Negara Maju Taiwan. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Reuters, (2022), Dukung Taiwan, AS akan menjual peralatan pendukung rudal patriot senilai US\$ 100 juta,/ <https://internasional.kontan.co.id/news/dukung-taiwan-as-akan-menjual-peralatan-pendukung-rudal-patriot-senilai-us-100-juta>
- Sibadu, F. (2022), Kajian Strategis: Konsep Dilema Keamanan dan Deterrence Dalam kekuatan Militer Negara Indonesia. <https://unifers.unifa.ac.id/detailpost/kajian-strategis-konsep-dilema-keamanan-dan-deterrence-dalam-kekuatan-militer-negara-indonesia>
- SIPRI (2023), SIPRI Arms Transfer Database. <https://www.sipri.org/databases/armstransfers>
- Syafiq, A. (2016). Aliansi Pertahanan Taiwan-Amerika Serikat Dalam Menghadapi *One China Policy* Periode 2011-2014. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Syahbuddin. (2019). Eksistensi Kepentingan Global Amerika Serikat dalam Konflik Tiongkok-Taiwan. STKIP Taman Siswa Bima.
- Tony, S. (2022). *From the US-Taiwan Economic Relationship to Sustainable Global Economic Development, In Changing Trade and Investment Relations of The Taiwanese Economy*.
- Yulyadi, dkk. (2023). Strategi Taiwan Dalam Menghadapi Ancaman Republik Rakyat Cina di Selat Taiwan, Vol. 7 No.1. Universitas Pertahanan Republik Indonesia.